

# SKRIPSI

**HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH  
PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
MAGELANG DALAM PENGELOLAAN TAMAN WISATA  
CANDI BOROBUDUR PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**



**RIKSI PIRDIANSA  
NIM. 1911150115**

*Prodi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah  
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu  
Tahun 2023 M/1444 H*

**HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA  
PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN MAGELANG DALAM  
PENGELOLAAN TAMAN WISATA CANDI  
BOROBUDUR PERSPEKTIF SIYASAH  
MALIYAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH)

**OLEH:**

**RIKSI PIRDIANSA**  
**NIM. 1911150115**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU 2023 M/1444 H**



## **HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Riksi Pirdiansa, NIM 191115011 dengan judul “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Perspektif Siyash Maliyah”. Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.**

Bengkulu, Juni 2023 M

1444 H

**Pembimbing I Pembimbing II**

  
**Dr. Rohmadi MA**

**NIP.197103201996031001**

  
**Ade Kosasih SH MH**

**NIP.198203182010011012**



**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh **Riksi Pirdiansa NIM 1911150115** yang berjudul **"Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Perspektif Siyasah Maliyah"**. Program Studi **Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:**

Hari : **Jumat**

Tanggal : **16 Juni 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **2023 M**

**A 1444H**

Dekan,

**Dr. Suwartin, S. Ag., MA**

Nip. 196904021999031004

**Tim Sidang Munaqasyah**

Ketua

Sekretaris

**Dr. Rohmadi MA**

**Ade Kosasih SH MH**

NIP. 197103201996031001

NIP. 198203182010011012

Penguji I

Penguji II

**Dr. Iim Fahimah MA**

**Ifansyah Putra M.sos**

NIP. 197307122006042001

NIP. 19930331201903100



## **SURAT PERNYATAAN**

**Dengan ini menyatakan:**

**1. Skripsi dengan judul “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Perspektif Siyash Maliyah”. adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.**

**2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim Pembimbing.**

**3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah sebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.**

**4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.**

**5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik**



berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023 M  
1444 H

Mahasiswa yang menyatakan

**Riksi Pirdiansa**  
NIM. 1911150115



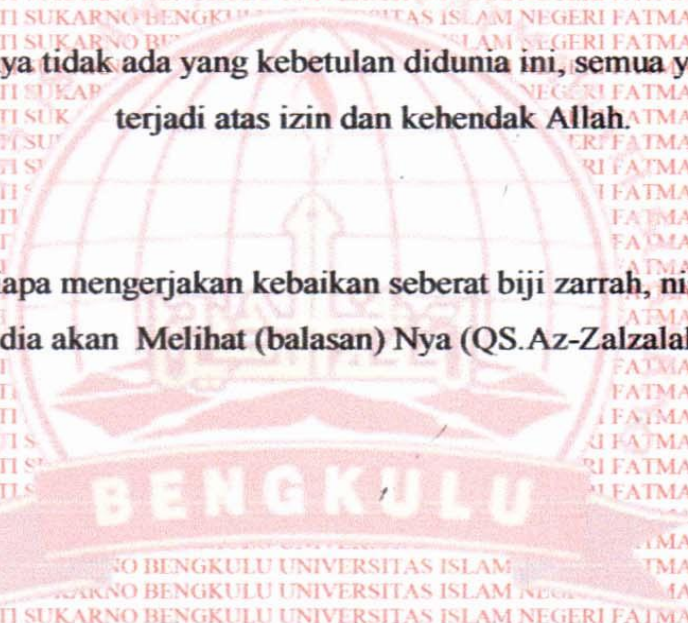


## MOTTO

**Untuk apa pendidikan setinggi apapun kalau belum mampu  
mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk apa? Pada  
Akhirnya meninggal juga. (Ustadz Adi Hidayat)**

**Sejatinnya tidak ada yang kebetulan didunia ini, semua yang  
terjadi atas izin dan kehendak Allah.**

**Barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarah, niscaya  
dia akan Melihat (balasan) Nya (QS.Az-Zalzalah:7).**





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahhirobilalamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan hikmah

kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, suatu kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga bahwa penulis bias sampai dititik ini, serta tidak terlepas kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup penulis dan selalu menghibur kala duka, memberi semangat dan motivasi untuk tidak putus dari rahmatNya, maka penulis persembahkan rasa terimakasih dan doa agar dibalas oleh Allah SWT. Terutama kepada:

1. Orang tuaku yang telah memberikan segala usaha beserta doanya untuk kesuksesanku.
2. Saudara-saudariku tersayang ( Kak Pinsi Hiriman Saputra, S.SI dan Adek Rani Patmala ) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
3. Kepada keluarga besar ku yang selalu ada dan selalu memberi semangat kepada ku untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Eko Aji Prasetyawan yang telah mau membantu dan memberikan dukungan kepada saya dalam hal apapun.
5. Kepada Pembimbing penulis skripsi Dr. Rohmadi S.Ag. M.A sebagai Pembimbing I dan bapak Ade Kosasih,S.H.,M.H sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan.



6. Untuk dosen-dosen di lingkungan UINFAS Bengkulu khususnya yang berada di lingkungan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

7. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2019 dan teman-teman kelas Hukum Tata Negara kelas C angkatan 2019.

8. Almamater yang telah menempahku menjadi pribadi "BE SMART".





## ABSTRAK

Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Perspektif Siyasah Maliyah. Oleh: Riksi Pirdiansa, NIM 1911150115.bPembimbing I: Dr. Rohmadi, S.Ag. MA. dan Pembimbing II: Ade Kosasih, SH. MH. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi, yaitu: (1) Bagaimana hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur, (2) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah maliyah dalam pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode hukum normative (normative law research) atau penelitian perpustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengetahui bekerjanya fungsi hukum, hubungan-hubungan hukum dan perbuatanperbuatan hukum yang terjadi dalam interaksi antar subjek hukum. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur merupakan salah satu kewenangan konkuren dibidang sejarah dan cagar budaya. (2) hubungan kewenangan tersebut terlihat dari pembagian zonasi yang terdiri dari 5 zona.

***Kata kunci:*** Hubungan Kewenangan, Taman Wisata Candi Borobudur, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Zonasi, Siyasah Maliyah.



## ABSTRACT

**Authority relating between the central government and the local government in managing the tourist Park Of The Borobudur temple's perspectives is siyasah maliyah.** By: Riksi Pirdiansa, NIM: 1911150115.

Advisor I: Dr. Rohmadi, S.Ag. MA and Advisor II: Ade Kosasih, SH. MH.

There are two issues discussed in the transcript: (1) how would authorities relate between the central government and the district government of maghawa in the management of the borobudur temple tourist park, (2) how the fiqh siyasah maliyah in the management of the borobudur temple tourist park. To address the matter in depth and breadth, researchers use normative law methods (normative law research) or library research aimed at knowing the function of legal function, legal relationships and legal actions occurring in legal subject interactions. Then the data is described, analyzed, and discussed to address the problem. The study found that (1) the borobudur tourist park management was one of the usual authority on history and conservation areas. (2) these authoritative relationships are shown by the 5 zone divisions.

**Keywords:** Privileges, Temple Parks Of Borobudur, Central Government, Provincial Government, Zoning, Siyasah Maliyah.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, serta rahmat shalawat dan salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Berkat limpahan rahmat dan hidayahnya-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Dalam skripsi ini, penulis meneliti perihal yang berjudul “Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur Perspektif Siyasah Maliyah”.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih Kepada bapak/ibu dosen yang telah membantu dalam proses baik itu dalam pengarahannya judul maupun proses seminar skripsi ini sendiri. Penulis sangat menyadari di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

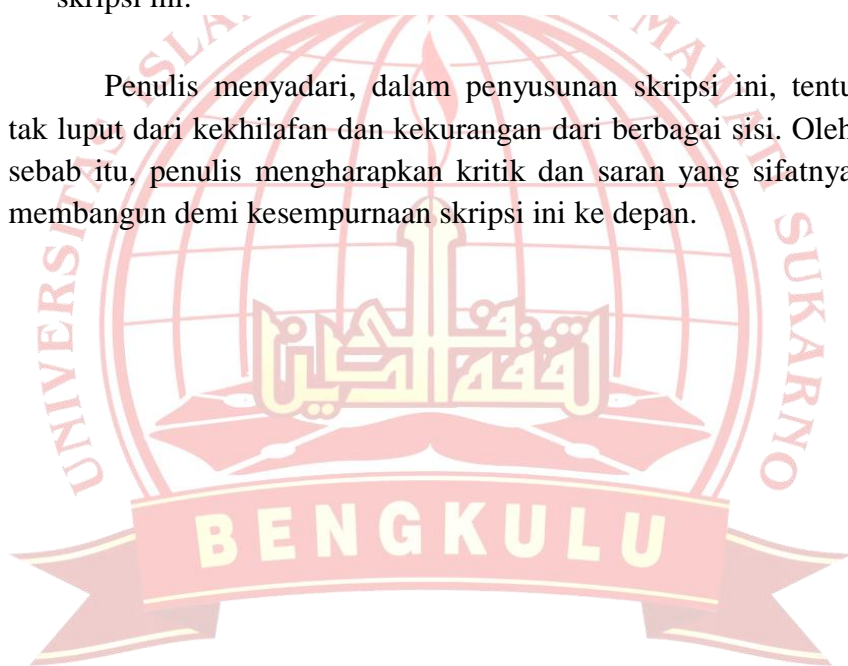


1. Prof, Dr. KH. Zulkarnain Dali. M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Iim Fahimah Lc., MA Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Dr Rohmadi S.Ag. MA Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Ifansyah Putra, M.Sos Kordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Dr Rohmadi S.Ag. MA sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Ade Kosaasih, SH.,MH sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
9. Ade Kosaasih, SH.,MH dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan, arahan, semangat dan motivasi,
10. Orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku



11. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keiklasan.
12. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
13. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Batasan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Kegunaan Penelitian .....	13
1. Kegunaan Teoritis .....	13
2. Kegunaan Praktis .....	14
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	15
2. Sumber Bahan Hukum .....	19
3. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Bahan Hukum .....	21
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	17
A. Teori Desentralisasi .....	17
1. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....	25
2. Konsep Desentralisasi .....	25
B. Teori Otonomi Daerah .....	44
1. Pengertian Otonomi Daerah .....	44
2. Hakikat Otonomi Daerah .....	45



3. Hak dan Kewenangan Otonomi Daerah.....	46
4. Tujuan Otonomi Daerah.....	47
5. Kewenangan Otonomi Daerah .....	49
6. Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah .....	52
C. Teori Siyasah Maliyah .....	53
1. Pengertian Siyasah Maliyah.....	53
2. Pengelolah kekayaan Negara/Daerah dalam Siyasah Maliyah .....	58
3. Kuangan Daerah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .....	64
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>81</b>
A. Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur .....	81
1. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur .....	81
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah .....	123
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>137</b>
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran.....	138

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN